

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT USAHA
KECIL (KUK) TERHADAP LIKUIDITAS PADA
BANK BRI CABANG SUNGGUMINASA
KABUPATEN GOWA**



**Diajukan oleh:
MUH. SYAHIR
4599012072**

**SKRIPSI
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi**

**JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS "45"
MAKASSAR
2004**

HALAMAN PENERIMAAN



Pada Hari / Tanggal : KAMIS / 15 JANUARI 2004

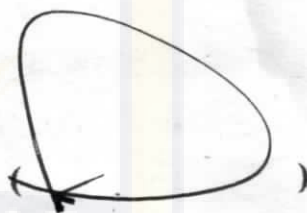
Skripsi Atas Nama : MUH. SYAHIR

No. Stambuk / NIRM : 45 99 012 072

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas "45" Makassar untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Manajemen.

PANITIA UJIAN SKRIPSI

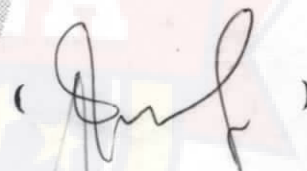
Pengawas Umum : DR. H. Rahmat Baro, SH, MH
(Rektor Universitas "45")

()

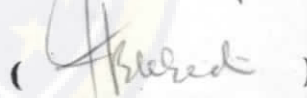
Ketua : Thamrin Abduh, SE, MSi
(Dekan Fak. Ekonomi Univ. "45")

()

Sekretaris : Seri Suriani, SE

()

Penguji : 1. H. M. Idris, SE, MSi

()

2. Haeruddin Saleh, SE, MSi

()

3. Miah Said, SE, MSi

()

4. Arifuddin, SE

()

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Rabbul Alamin, atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Univesitas "45" Makassar.

Penulis menyadari bahwa apa yang telah diraih selama ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menghaturkan ucapan terima kasih serta penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak **H. Muh. Idris SE, MSi** dan Bapak **A. Arifuddin, SE** selaku pembimbing I Dan II yang dengan tulus ikhlas serta penuh kesabaran memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis, dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, juga penulis tidak lupa sampaikan kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 45 Makassar beserta Dosen Staf yang telah memberikan bimbingan dan bantuan kepada penulis selama mengikuti pendidikan.
2. Ibu **Herminawati, SE, MM** dan **Sri Suryani, SE** selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen.
3. Pimpinan Cabang Bank BRI Sungguminasa Gowa beserta Staf dan Karyawan yang telah memberikan izin dan bantuan kepada penulis selama melaksanakan penelitian.

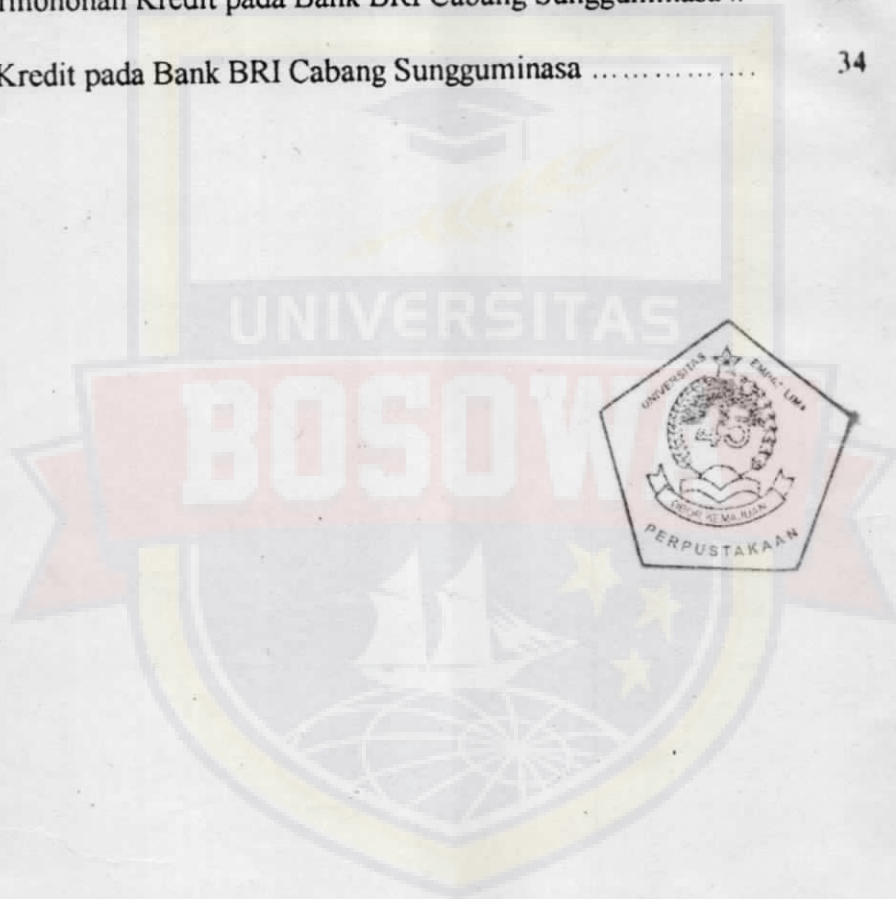
DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1. Pengertian Bank	5
2.2. Fungsi dan Tujuan Bank	6
2.3. Lembaga Keuangan Bank	7
2.4. Pengertian Kredit	8
2.5. Kerangka Pikir	21
2.6. Hipotesis	22

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	23
3.1. Daerah Penelitian	23
3.2. Metode Pengumpulan Data	23
3.3. Metode Analisis	24
3.4. Defenisi Operasional	25
BAB IV. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	26
4.1. Sejarah Singkat Bank BRI	26
4.2. sistem dan Prosedur Kebijakan Kredit.....	35
4.3. Perkembangan Perkreditan Bank BRI	43
4.4. Laporan Kinerja Bank BRI	44
4.5. Analisa Pengaruh Kebijakan Pemberian Kredit	47
BAB V. KESIMPULAN	59
5.1. Kesimpulan	59
5.2. Saran-saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR GAMBAR

	Hal
4.1. Bagan organisasi Bank BRI Cabang Sungguminasa	30
4.2. Struktur Organisasi Kantor pusat dan Cabang Bank BRI.....	31
4.3. Prosedur Permohonan Kredit pada Bank BRI Cabang Sungguminasa ..	33
4.4. Persetujuan Kredit pada Bank BRI Cabang Sungguminasa	34



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, topik tentang keberpihakan pada ekonomi rakyat khususnya sistem usaha kecil menjadi semakin urgen dan perlu terus dikaji serta disempurnakan sebagai upaya bersama meningkatkan perekonomian rakyat kecil.

Bila diamati paradigma pembangunan mutakhir yang lebih terorientasi kepada rakyat banyak terutama dalam rangka perspektif PJPT II, maka setidaknya terdapat dua alasan pokok yang layak di kedepankan untuk menjelaskan fenomena tersebut.

Pertama, karena setelah PJPT II nampak kecenderungan bahwa sektor usaha yang melibatkan pengusaha kecil hanya tumbuh secara perlahan, sementara pelaku yang tergolong besar mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga dampak selanjutnya adalah kesenjangan ekonomi yang semakin lebar.

Kedua, terfokusnya basis perekonomian pada segelintir pelaku ekonomi yang berskala besar, belumlah merupakan jaminan bahwa perekonomian kita telah aman dari guncangan. Hal ini terbukti dari beberapa kasus yang melanda sebahagian pelaku ekonomi yang tergolong besar, diantaranya kasus Collaps nya Bank Summa, kasus Bank Duta dan kasus kredit macet yang mencapai 1,4 trilyun rupiah dari Galden Key Group serta, beberapa bank yang dilikuidasi.

Dari kasus-kasus tersebut diatas menjadi salah satu indikasi bahwwa sebagian hal yang selama ini dianggap kuat dan besar pada kenyataannya sangat rapuh.

Usaha Kecil (KUK) kepada masyarakat yang memang membutuhkan bantuan pemerintah.

Memang, usaha perkreditan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perbankan dimana sebahagian besar pendapatan yang diperoleh bank dari kegiatan ini. Namun harapan sebab kegiatan perkreditan ini tidak selamanya dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan sebab kegiatan perkreditan ini tidak selamanya dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan sebab kegiatan perkreditan mempunyai tingkat resiko yang cukup tinggi.

Untuk melihat perkembangan kredit usaha kecil pada bank BRI periode 1998/ 2002 akan di sajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.

Perkembangan Kredit Usaha Kecil (KUK) pada Bank BRI Tahun 1998-2002

TAHUN	NILAI KREDIT	% KENAIKAN
1998	476.582	-
1999	502.546	5,4 %
2000	467.763	6,9 %
2001	610.196	30,4 %
2002	1.017.060	66,7 %

Sumber : Bank BRI Sungguminasa Gowa.

Oleh karenanya perhatian yang besar pada masyarakat menengah kebawah sangat dituntut guna meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Perhatian yang besar terhadap pengembangan sektor usaha kecil dewasa ini adalah sangat

beralasan mengingat peranannya yang sangat strategis dalam menjawab tantangan pembangunan, salah satu solusinya adalah dengan pemberian Kredit Usaha Kecil (KUK) kepada masyarakat khususnya tergolong ekonomi lemah agar dapat dijadikan sebagai salah satu modal usaha yang diharapkan dapat berkembang dengan pesat.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalahnya adalah “Apakah dengan kebijakan pemberian kredit usaha kecil (KUK) pada bank BRI dapat meningkatkan likuiditas perusahaan”.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui kebijakan pemberian kredit usaha kecil (KUK) pada bank BRI Cabang Sungguminasa Gowa.
2. Untuk mengetahui tingkat likuiditas perusahaan dengan adanya kebijaksanaan pemberian kredit pada Bank BRI Cabang Sungguminasa Gowa.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi pihak perbankan khususnya Bank BRI dalam pengambilan keputusan.
2. Sebagai bahan referensi bagi penelitian yang relevan dimasa yang akan datang

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Bank

Sejak beberapa abad yang lalu, masyarakat sudah mengenal bank terutama bank umum atau bank komersial yang telah memegang peranan penting dalam membantu dan mendorong kemajuan perekonomian suatu bangsa dan negara. Bila dikaitkan dengan kehidupan moderen saat ini maka kebutuhan akan pelayanan akan terasa sangat penting mengingat kebutuhan kita sekarang ini yang berkaitan dengan keuangan semakin meningkat seiring dengan kemajuan peradaban manusia moderen.

Untuk mengerti sebagaimana fungsinya sebagai lembaga keuangan, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian bank secara mendetail.

Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan ditegaskan mengenai pengertian bank sebagai berikut :

“Banka dalah badan usaha yang menghimpun dana-dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Sedangkan menurut Thomas Suyatno, (1990 : 46) pengertian Bank adalah :

“Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan beberapa macam jasa seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai penyimpanan benda-benda berharga, dan lain-lain”.

Adapun mengenai Bank Indonesia yang merupakan Bank Sentral telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 1968 dengan tugas pokok membantu pemerintah dalam :

- a. Mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
- b. Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

pendapat dan mengajukan perbedaan pendapatnya pada Pemerintah atau Presiden.

Jadi yang dimaksud dengan tugas-tugas Bank Indonesia pada paragraph diatas adalah yang berkaitan dengan tugasnya selaku alat pemerintah. Sedangkan keseluruhan tugas dan atau fungsi Bank Indonesia adalah apa akan diringkaskan di bawah ini :

- a. Bankers' Bank
- b. Lender of Last resort
- c. Pengatur peredaran uang

2.4 Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Credere* yang berarti percaya. Oleh karena itu landasan kredit adalah saling percaya antara pihak pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima kredit (debitur).



Pengertian kredit menurut Drs. Achmad Anwari (1992:52), adalah sebagai berikut :

“ Kredit adalah suatu pemberian presentasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan presentasi itu akan dikembalikan lagi pada waktu tertentu yang akan datang dengan disertai suatu kontrak perestasi (balas jasa) yang berupa bunga”.

Teguh Pujo Mulyono (1995:67) memberikan pengertian kredit sebagai berikut :

“ Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran akan dilaksanakan atau ditangguhkan sampai jangka waktu yang telah disepakati “.

Menurut pasal 1 ayat 122 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan ditegaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang yang diwajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tetentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Dari beberapa definisi kredit yang telah dikemukakan, terdapat unsur-unsur yang terkandung di dalam pengertian tersebut antara lain :

- a. Kredit adalah mengenai uang atau yang disamakan dengan uang
- b. Kredit adalah perjanjian dua belah pihak, antara peminjam dana dan yang meminjam.
- c. Kredit mempunyai batas waktu tertentu dan penerima kredit memiliki kewajiban sesuai perjanjian berupa bunga atau bunga laba.

2.4.3 Pengertian Likuiditas dan Fungsinya

Secara umum likuiditas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kewajiban membayar uang kas apabila diperlukan. Menurut Dhyahartono (1992 : 114) Likuiditas adalah kesanggupan seseorang, kelompok, bisnis, atau organisasi apapun untuk memenuhi analisisnya.

Sedang ratio likuiditas adalah ratio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban. Finansialnya pada saat jatuh tempo utang jangka pendek. Dengan kata lain, suatu bank dikatakan likuid apabila bank tersebut dapat memenuhi kewajiban penarikan uang dana maupun dari para peminjam/debitur.

Penguasaan dan pemahaman para pimpinan bank terhadap likuiditas merupakan langkah yang strategis. Mereka harus mampu mengelola neraca bank yang dipercayakan nilai dengan analisis yang dalam tentang likuiditas dan exposure suku bunganya. Analisis likuiditas harus dilakukan sebelum dilakukan exposure suku bunga rendah pada dasarnya pimpinan bank tidak akan dapat membuat putusan untuk mengubah exposure suku bunga sebelum mereka mengetahui posisi likuiditasnya.

Bagi perusahaan bank, likuiditas merupakan jantung utama karena menyangkut kepercayaan. Sekali pemilik uang tidak dapat mengambil uangnya yang disimpan di bank yang bersangkutan, masyarakat tak akan percaya pada bank tersebut. Apabila ini terdengar oleh penitip lainnya, maka penitip dana ini mungkin sekali menarik dananya dari bank. Jika hal ini terjadi, bank tersebut dapat mengalami kebangkrutan karena terjadinya rush (Penarikan Uang Dari Bank Secara Besar-besaran).



dimasa mendatang. Selanjutnya bank memasukkan kebutuhan kredit yang potensial dalam perhitungan posisi likuiditas yang direncanakannya. Bank harus memelihara tingkat likuiditas yang cukup.

3. Mencegah penjualan asset secara terpaksa apabila dalam posisi likuid cukup berat, bank tersebut mungkin tidak dapat memperpanjang pinjaman yang diterima dari bank lain. Lebih-lebih jika pinjaman tersebut jatuh tempo karena bank tidak mampu menciptakan rasa aman kepada para pemilik dana. Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan terpaksa menjual surat berharga yang umumnya dengan harga rendah (merugi). Hal itu jelas akan memperburuk tingkat modal bank tersebut.

4. Menghindarkan diri dari kewajiban membayar suku bunga yang tinggi atas dana yang diperoleh dipasar uang.

Konsep dasar mengatakan bahwa besar kecilnya persepsi resiko merupakan fungsi dari tinggi rendahnya suku bunga. Demikian pula dengan likuiditas suatu bank dimata pemilik dana. Pemilik dana akan menganggap bahwa menempatkan dananya dengan suku bunga yang tinggi pada bank tersebut. Bahkan, mungkin pula bahwa pemilik dana tidak mau menempatkan dananya pada bank yang mempunyai masalah likuiditas serius.

5. Menghindarkan diri dari penggunaan fasilitas discount window secara terpaksa.

Semakin sering suatu bank menggunakan fasilitas discount window, semakin tidak bebas manajemen bank tersebut menentukan dana dan melaksanakan kebijakan usahanya. Hal itu disebabkan karena pada umumnya bank sentral akan

2.6 Hipotesis

Diduga bahwa dengan adanya kebijaksanaan pemberian kredit usaha kecil (KUK) pada Bank BRI Cabang Sungguminasa Gowa dapat meningkatkan Likuiditas Perusahaan.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Daerah Penelitian

Daerah penelitian ini berlokasi di Bank BRI Cabang Sunguminasa Gowa, yaitu Analisa kebijakan pemberian Kredit Usaha Kecil (KUK) terhadap likuiditas pada Bank BRI.

Pemilihan Bank BRI sebagai daerah penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa Bank BRI merupakan salah satu bank pemerintah yang cukup berkompeten dan mempunyai tingkat kredibilitas yang cukup baik dimata masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan

3.2 Metode Pengumpulan Data.

Untuk menunjang serta memperoleh masukan data yang lebih akurat, maka metode yang digunakan adalah:

Field Research (Penelitian Lapangan), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada kantor cabang Bank BRI untuk memperoleh data primer yaitu menggunakan atau mengadakan wawancara langsung dengan para staf yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan diteliti maupun atas jawaban yang diterima atas datar kuisisioner yang diajukan. Disamping itu penulis mengumpulkan beberapa data lainnya seperti dokumen-dokumen perusahaan yang relevan dan masukan data yang merupakan data sekunder.

Adapun bentuk formulasinya :

$$\text{Bankin Ratio} = \frac{\text{Total Loans}}{\text{Total Deposit}}$$



Dengan asumsi bahwa dalam Ratio ini semakin besar tingkat Ratio ini maka tingkat likuiditasnya semakin kecil.

3.4 Defenisi Operasional.

1. Bank = Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
2. Kredit = Suatu pemberian presentasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan presentasi itu akan dikembalikan lagi pada waktu tertentu yang akan datang dengan disertai suatu balas jasa yang berupa bunga.
3. KUK = Kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit maksimum Rp. 250. 000.000. (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk membiayai usaha yang produktif.
4. Likuiditas = Kesanggupan seseorang, kelompok, bisnis atau organisasi apapun untuk memenuhi kewajiban finansialnya setiap saat.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Sejarah singkat Bank BRI

Bank "BRI" didirikan pertama kali di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wijaatmaja dengan nama Hup en Sparbank der inlansehe Bestuurs Abtenaren atau dengan nama Bank Bantuan dan Simpanan milik kaum priyayi. Yang berkebangsaan priyayi Indonesia (Pribumi). Berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari lahir BRI.

Pendiri Bank Rakyat Indonesia Raden Aria Wiraatmadja pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1946 pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Adanya situasi peran mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan beruba nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 11 tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan Nederlansche Maatscappy kemudian berdasarkan penetapan presiden (Penpres) No.9 tahun 1965, BKTN di integrasikan kedalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama satu bulan keluar Penpres No.17 tahun 1965 tentang pembentukan Bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) di

4.2 Sistem dan prosedur kebijaksanaan kredit pada bank BRI

Setiap bank seharusnya dapat menyusun kebijaksanaan kredit yang sehat dilengkapi dengan tata cara sistem maupun prosedur pembahasan kredit yang sehat dilengkapi dengan tata cara sistem maupun prosedur pembahasan yang tepat sehingga semua aktivitas bank dapat mendatangkan keuntungan tanpa mengabaikan penjagaan likuiditas. Olehnya itu ada dua hal pokok yang harus diperhatikan oleh pejabat pemberi kredit (Wira) dalam proses pembahasan kredit yaitu kepentingan bank itu sendiri dan kepentingan nasabah.

Bank BRI dalam prosedur kebijaksanaan pemberian kreditnya dilakukan oleh dua biro yaitu :

- a. Untuk permohonan kredit baru, pembahasannya dilakukan oleh biro perkreditan
- b. Untuk kredit yang sifatnya perpanjangan, pembahasannya dilakukan oleh supervisi kredit dan pembinaan nasabah.
- c. Untuk pengambilan kredit ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak perbankan dan dari pihak kreditur agar tidak terjadi kesalah pahaman antara keduabelah pihak.

Karena pentingnya para wira dalam proses pembahasan dan pemutusan kredit ini, maka para wira tersebut diharapkan dapat bertanggung jawab pada aktivitas pemberian kredit tersebut. Meskipun demikian otoritas yang dimiliki tidaklah terlepas dari sistem pengawasan yang ada. Dalam Operasionalnya, Para Wira harusnya mempunyai wewenang untuk dapat memutuskan kredit agar sesuai



dengan batas limit yang ditentukan, setelah melalui Loan Committee kecil yang beranggotakan para wira. Dalam Kaitan ini di Bank BRI terdapat klasifikasi batas limit dalam hal memutuskan kredit yaitu :

- a. Untuk Cabang Madya mempunyai wewenang memutuskan kredit dengan batas limit maksimum Rp. 50.000.000.
- b. Cabang Utama, Biro perkreditan dan biro supervisi kredit dikantor pusat memiliki wewenang memutuskan kredit maksimal Rp. 100.000.000,- setelah melalui Loan Committee kecil.
- c. Untuk memutuskan jumlah kredit Rp. 10 juta sampai dengan Rp 100 juta dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Loan committee dan Direksi
- d. Sedang untuk pemutusan kredit Rp. 100 juta keatas doi lakukan oleh pihak oleh pihak Loan Committee setelah mendapat izin persetujuan dari dewan Pengawas.

Seperti diketahui bahwa para wira merupakan ujung tombak pada Bank BRI yang mempunyai prospek layak untuk diberi kredit.

Untuk memahami lebih jauh mengenai sistem dan prosedur kebijaksanaan pemberian kredit pada Bank BRI maka secara kronologis akan diuraikan sebagai berikut :

1. Tahapan Pendekatan

Pada tahapan ini para wira mencari nasabah yang dianggap layak untuk diberi kredit. Cara untuk menemukan nasabah adalah :

- a. Calon nasabah datang sendiri bank .

- b. Ditemukan oleh para wira.
- c. Atas saran dari rekan ataupun bank lain.

2. Tahapan Permohonan Resmi

Dalam hal ini bank memberikan daftar isian formulir kepada calon nasabah yang didalamnya memuat :

- a. Identitas lengkap pemohon
- b. Identitas usahanya
- c. Keterangan pinjaman yang diminta

3. Penilaian jaminan/Tahap apparasal

Dimaksudkan untuk mengetahui kondisi jaminan, baik berupa fisik maupun berupa hukum. Untuk membuktikan keterangan ini, para wira mengadakan peninjauan langsung atas jaminan tersebut.

- 4. Oleh pihak bank BRI (analisis Credit) akan membuat NAK (Nota Aplikasi Kredit) yang membuat beberapa hal mendasar sehubungan dengan permohonan kredit tersebut.
- 5. Bila disetujui, maka diadakan legalisasi kredit. Dalam hal ini, pihak bank menyampaikan surat penegasan kredit yang menjelaskan bahwa permohonan tersebut disetujui.
- 6. Tahap selanjutnya adalah penanda tangan akad kredit antara Bank BRI dengan pihak nasabah.

Untuk memahami kelangsungan sistem dan prosedur pemberian kredit pada bank BRI, maka berikut ini (Skema I dan Skema II)

4.2.1. Tata Laksana kredit

Untuk mempermudah sistem pengawasan dan pengebdalian terhadap suatu pimpinan bank BRI usaha dalam pelayannnya kepada nasabah, maka pimpinan bank BRI menetapkan kebijaksanaan pemberian kredit yang terbagi atas :

Perencanaan Perkreditan.

Menurut Charles K. Frather (1989 : 27) dalam bukunya tentang kredit bahwa kredit adalah :

“ The world credit has many meanings, but in economies usually refers to tehe ability to obtai something of value in the present in return for apromise to pay at some future time, combining the elements of a promise and time “ .

- Sisa pinjaman tahun lalu.
- Ciling Krdit (flafond kredit)
- Dari selisih antara kredit dengan sisa pinjaman tahun lalu akan diperoleh suatu gambaran mengenai ekspansi kredit.
- Hubungan antara biaya dana dengan bunga pinjaman. Dalam hal ini bahwa kedua hal tersebut harus memperlihatkan / menunjukkan hubungan yang sehat.
- Ketergantungan pada proyek / Komoditi harus selalu dihindari.

- Hubungan antara suku bunga pinjaman dengan tingkat bunga kredit, benar-benar dapat diterima secara wajar
- Hubungan antara dana perkreditan dengan sisa pinjaman harus menunjukkan hubungan yang sehat artinya bahwa apabila bank menginginkan Cash Ratio 20% maka dari pinjaman sebanyak 80% harus disalurkan.
- Hubungan antara pengalokasian kredit ke berbagai sector harus tetap mengacu pada pola strategis.

4.2.3 Pengelompokan kredit

Dalam mengelola, menata dan mewarisi kegiatan perkreditan agar tetap mengacu dan tertuju pada sasaran yang tepat, maka perlu untuk mengadakan pengelompokan kredit menurut koleksibilitasnya yaitu :

1. Kredit Lancar

Sejak kredit direalisasi hingga dilunasi kembali maka suatu pinjaman dikatakan lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Untuk pinjaman dengan angsuran

- Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan bunga, maupun cerukan karena penarikan.
- Terdapat tunggakan angsuran pokok tapi tidak melampaui suatu masa angsuran berikutnya atau belum melampaui enam bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan enam bulan.
- Terdapat tunggakan bunga tapi belum melampaui tiga bulan.

- Terdapat cerukan karena penarikan, tetapi waktunya belum melampaui ketentuan yang berlaku.
- b. Untuk Pinjaman Tanpa angsuran
- tidak terdapat tunggakan bunga maupun cerukan
 - terdapat tunggakan bunga tetapi belum melampaui tiga bulan.
 - Terdapat cerukan karena penarikan, tetapi waktunya belum melampaui ketentuan pokok.
- c. Untuk cerukan rekening giro terdapat cerukan tapi jangka waktunya belum melampaui ketentua.

2. Kredit kurang lancar

Yang termasuk dalam kredit yang digolongkan kurang lancar menurut surat edaran Bank Indonesia No 20/3/BPPP tanggal 20 Juni 1987 adalah

- a. Pinjaman dengan angsuran
- Terdapat tunggakan pokok melampaui tiga bulan atau suatu masa angsuran berikutnya.
 - Terdapat tunggakan bunga yang melampaui angsuran berikutnya.
 - Terdapat cerukan karena penarikan yang jangka waktunya ditetapkan.
 - Terdapat cerukan karena penarikan yang jangka waktunya telah melampaui ketentuan tetapi belum melampaui empat bulan.

- b. Pinjaman tidak dapat diselamatkan, tetapi jaminan masih bernilai sekurang-kurangnya 100 % dari hutang debitur.

Terdapat kredit yang diragukan ini, bank harus menentukan sikap untuk menyelesaikannya. Umumnya penyelesaian kredit yang diragukan adalah :

- Penyelesaian secara damai, dalam hal ini nasabah disarankan untuk menjual sendiri jaminannya agar dapat menutupi hutangnya.
- Penyelesaian secara hukum bila segala sesuatu telah ditempuh untuk menyelesaikannya.

4. Kredit Macet

Suatu pinjaman tergolong macet bila :

- a. Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan.
- b. Memenuhi kriteria yang diragukan, tetapi dalam waktu 18 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada usaha penyelesaiannya.

Adapun prosedur pengajuan kredit macet ini didalam penyelesaiannya adalah melalui saluran hukum dengan cara sebagai berikut :

- a. Petugas membina kredit menyiapkan penagihan keseluruhan hukum dengan mengambil langkah langkah :
 - Mengadakan penelitian terakhir mengenai kekayaan debitur baik yang dijadikan jaminan maupun tidak.
 - Menetapkan jumlah yang harus ditagih beserta perinciannya.
 - Menyusun laporan tentang pinjaman nasabah sebagai pelengkap dalam penyerahan penagihan pada nasabah.

- b. Berkas perkara yang akan diajukan ke BUPN harus memuat secara lengkap keterangan debitur.
- c. Dalam penyerahan berkas perkara pinjaman itu, maka pihak BUPN akan menandatangani surat-surat pernyataan penerimaan penyerahan.
- d. Penagihan piutang selanjutnya ditandatangani oleh BUPN dengan mengikuti perkembangan selanjutnya.

4.3 Perkembangan Perkreditan bank BRI tahun 1999 sampai dengan tahun 2003

Seperti telah diuraikan pada bab terdahulu hingga saat ini bank BRI telah menyalurkan delapan jenis kredit yang disalurkan diberbagai sektor. Pada tabel berikut ini (Tabel III) terlihat bahwa perkembangan dana perkreditan pada bank BRI memperlihatkan prosentase peningkatan yang cukup menggairahkan dimana untuk tahun peningkatan 1999 jumlah kredit yang disalurkan sebesar Rp. 14.315 juta yang mana dari jumlah ini 68,47% atau Rp 9.802 juta tersalur pada sector kredit jangka pendek. Pada tahun 2000 jumlah kredit yang disalurkan sebesar Rp. 16 966 juta yang mana dari jumlah tersebut 70,75% atau Rp.12.005 juta disalurkan pada sektor kredit jangka pendek. Pada tahunberikutnya yaitu tahun 2001 jumlah kredit yang telah disalurkan sebesar Rp. 23.429 juta yang mana dari jumlah tersebut 5937% tersalur pada sektor kredit jangka pendek atau sebesar Rp. 13.888 juta. Dan pada tahun 2000 jumlah kredit yang disalurkan sebesar Rp.23.071 juta yang mana dari jumlah tersebut 75,37% tersalur pada sektor kredit jangka pendek atau sebesar Rp. 17.368.



TABEL 1
NERACA BANK BRI SUNGGUMINASA
PER 31 DESEMBER
(JUTAAN RUPIAH)

URAIAN	TAHUN			
	1999	2000	2001	2002
Aktiva :				
Kas	22.056	24.544	35.010	37.710
Giro pada Bank Indonesia	100.546	57.094	149.388	147.162
Giro pada Bank Lain	2.927	4.333	22.500	17.396
Penempatan pada Bank lain	100.392	276.253	320.823	396.912
Surat-surat berharga	92.573	155.606	203.765	248.700
Kredit yang diberikan				
Rupiah	1.011.378	1.222.512	1.872.015	1.939.238
Valuta Asing	744	880	6.136	5.279
Penyisihan Pengh. Kredit	(8.524)	(10.150)	(16.704)	(18.438)
Penyertaan	52	53	57	60
Pendapatan yang belum diterima	20.112	50.111	49.529	71.891
Aktiva tetap	78.490	130.057	231.711	226.551
Aktiva sewa guna usaha	7.946	9.224	25.321	31.458
Aktiva lain-lain	29.684	22.773	18.969	15.911
TOTAL AKTIVA	1.458.376	1.953.290	2.918.520	3.119.830
Passiva :				
Giro	153.687	174.958	209.058	243.440
Tabungan	401.985	464.964	553.155	634.101
Deposito berjangka	731.156	908.626	1.573.807	1.590.842
Sertifikat Deposito	31.332	44.107	121.239	118.214
Pinjaman yang diterima	6.245	167.152	105.785	166.049
Lainnya	10.325	28.494	39.650	43.802
Kewajiban lain-lain	7.358	16.657	42.957	42.921
Ekuitas				
Dana Setoran Modal	76.213	96.507	207.880	199.190
Laba yang ditahan	40.075	51.825	64.989	81.271
TOTAL PASSIVA	1.458.376	1.953.290	2.918.520	3.119.830

Sumber : Hasil Olahan Dari Data Bank BRI Cabang Sungguminasa.

TABEL 2
LABA RUGI BANK BRI
(JUTAAN RUPIAH)

URAIAN	Tahun			
	1999	2000	2001	2002
Pendapatan Operasional				
Kredit Yang diberikan				
Rupiah	245.111	256.877	404.800	416.710
Valuta Asing	601	629	992	1.021
Giro pada Bank lain	1.203	1.261	1.988	2.046
Penempatan pd Bank Lain	25.377	26.596	41.911	43.144
Surat-Surat berharga	13.736	14.396	22.686	23.353
Penyertaan	4	4	6	6
Profesi dan Komisi	8.634	9.574	10.515	10.897
Jumlah Penghasilan Bunga	294.666	309.337	482.897	497.177
Penghasilan Operasional lain	3.092	5.509	17.675	15.473
Jumlah Penghasilan Op. lain	297.758	5.509	17.675	15.473
Jumlah pendapatan Operasional		304.846	500.572	512.650
Biaya Operasional				
Biaya Bunga				
Giro	10.071	10.233	17.091	17.309
Tabungan	67.335	68.414	114.265	115.723
Deposito Berjangka	136.985	139.181	232.458	235.424
Sertifikat Deposito	8.745	8.886	14.841	15.030
Pinjaman yang Diterima	10.744	10.916	18.232	18.465
Biaya Bunga Lainnya	2.931	2.978	4.974	5.037
Jumlah Biaya Bunga	236.812	240.608	401.860	406.988
Biaya Operasional lainnya				
Biaya Umum dan Administrasi	31.977	48.948	63.306	69.371
Biaya lainnya	12.754	11.328	15.342	13.495
Jumlah Biaya Op. lainnya	44.731	60.276	78.648	82.866
Jumlah Biaya Operasional	281.543	300.884	480.508	489.854
Laba Operasional	16.215	13.962	20.064	22.796
Penghasilan non Operasional	2.895	3.238	2.956	3.568
Biaya non operasional	(1.466)	(1.656)	(1.732)	(1.686)
Penghasilan non operasional	1.429	1.582	1.224	1.882
Laba sebelum Pajak	17.644	15.544	21.288	24.678
Taksiran Pajak	-	3.794	8.124	8.396
Laba / Rugi tahun berjalan	10.644	11.750	13.164	16.282

Sumber : Bank BRI Cabang Sunnguminasa.

4.5 Analisis Pengaruh Kebijakan Pemberian Kredit Terhadap Likuiditas Bank BRI

Bank sebagai suatu badan perusahaan yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan laba agar kelangsungan atau kontinuitas perusahaan dapat berjalan secara lancar. Dalam hal masuknya dana dari masyarakat, bank diperhadapkan pada biaya dana yang diterimanya. Dengan demikian jika suatu bank mempunyai ketersediaan dana melebihi rencana operasinya maka setoran atau deposit yang sudah ada diusahakan untuk dikembangkan atau diperbesar lagi tentunya dalam hal bahwa kebijaksanaan yang harus ditempuh adalah dapat menguntungkan pihak bank dan para penitip dana.

Agar posisi dana yang ada pada bank selalu berada pada posisi yang optimal atau suatu keadaan dimana kebutuhan akan dana dapat disesuaikan dengan rencana operasional perusahaan/bank maka sumber dan penggunaan dana merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mempertahankan tingkat likuiditas bank. Dalam mempertahankan kesehatan bank, hendaknya tidak sampai lebih rendah dari ratio minimal yang diisyaratkan oleh Bank Indonesia, sebesar 15% sebelum pakto 27 Oktober 1988 dan 2% sesudah pakto 27 Oktober 1988, olehnya itu suatu pihak bank perlu untuk tidak menggunakan dana melebihi batas sumber dana, atau tidak terlalu memperhatikan tingkat likuiditas sehingga melampaui tingkat yang diisyaratkan yang pada gilirannya akan menurunkan pendapatan bank.

4.5.1 Metode Analysis yang digunakan pada likuiditas Bank BRI

1. **Banking Ratio** yaitu kemampuan Bank untuk membayar kembali kewajibannya kepada para deposannya dengan menarik kembali kredit-kredit yang telah diberikan kepada debiturnya

$$\text{Banking Ratio} = \frac{\text{Total Pinjaman}}{\text{Deposits}}$$

(Rp 000.000)

PERKIRAAN	1999	2000	2001	2002
Pinjaman (Rupiah)	1.011.378	1.222.512	1.827.015	1.939.238
Pinjaman (Valas)	744	880	6.136	5.279
Peny. Penghasilan Pinj.	(8.524)	(10.150)	(16.7040)	(18.438)
Pinjaman	1.003.598	1.213.242	1.861.447	1.926.076
Jumlah Deposito	1.318.160	1.592.655	2.457.259	2.586.597
Banking Ratio	0,7614	0,7618	0,7575	0,7446

2. **Quick Ratio** yaitu kemampuan bank untuk membayar kembali kewajibannya kepada para deposannya dengan cash asset yang dimilikinya

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Cash Asset}}{\text{Deposits}}$$

(Rp.000.000)

PERKIRAAN	1999	2000	2001	2002
Kas	22.056	25.444	35.101	37.710
Giro pada BI	100.546	57.094	149.388	147.162
Giro pada Bank lain	2.927	4.333	22.500	17.396
Jumlah Cash Asset	125.529	85.971	206.898	202.268
Giro	153.687	174.958	209.058	243.440
Tabungan	401.985	464.964	553.155	634.101
Deposito Berjangka	731.156	908.626	1.573.807	1.590.842
Sertifikat Deposito	31.332	44.107	121.239	118.214
Jumlah Deposito	1.318.160	1.592.655	2.457.259	2.586.597
Quick Ratio	0,0952	0,0540	0,0842	0,0782

Sumber : Hasil Olahan Data Bank BRI Cabang Sungguminasa

Dalam menganalisa kebijaksanaan pemberian kredit pada Bank BRI, suatu analisis yang digunakan maka Bank BRI dapat dikatakan berhasil dalam menghimpun dana dan kembali menyalurkannya kepada masyarakat, ini terbukti bahwa dari tahun ke tahun mengalami kenaikan tingkat persen yang mengembirakan. Dimana BRI adalah suatu Bank Permanen terbesar yang memang bertugas untuk mendapatkan laba agar kelangsungan atau kontinuitas perusahaan dapat berjalan dengan lancar.

Demikian halnya jika suatu Bank mempunyai ketersediaan dana melebihi rencana operasinya, maka setoran atau deposit yang akan diterimanya diperuntukkan untuk dikurangi, begitu pula jika suatu bank merasa bahwa dana yang ada belum mencukupi rencana operasinya maka setoran atau deposit yang sudah ada diusahakan atau untuk dikembangkan atau diperbesar lagi tentunya dalam hal bahwa kebijaksanaan yang harus ditempuh adalah dapat menguntungkan pihak Bank dan para penitip dana.

Agar posisi dana yang ada pada Bank selalu berada pada posisi yang optimal atau suatu keadaan dimana kebutuhan akan dana dapat disesuaikan dengan rencana operasional perusahaan / Bank, maka sumber dan penggunaan dana merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mempertahankan tingkat likuiditas Bank.

Berikut ini kembali kita akan melihat bagaimana komposisi dana dan supply dana perkreditan pada Bank BRI Cabang Sungguminasa untuk periode tahun 1999 -2002

TABEL IV
KOMPOSISI SUPLAY DANA (PINJAMAN)
PADA BANK BRI
(Dalam Jutaan Rupiah)

KOMPOSISI DANA	TAHUN			
	1999	2000	2001	2002
Jangka Pendek	87.600	99.735	159.505	159.51
Jangka Panjang	65.769	87.753	97.859	22.279
Jumlah	13.369	17.4888	23.359	22.279
PROSENTASE				
Jangka Pendek	56.84	55,56	56,37	69,62
Jangka Panjang	43,16	44,44	43,63	30,38
PROSENTASE PERUBAHAN				
Jangka Pendek	28,09	59,27	0,03	22 05

5.4.5. Comparized Composition (Komposisi Perbandingan)

Dalam analisa komposisi perbandingan ini, penulis mencoba memberikan gambaran mengenai upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pihak bank BRI setelah melihat bagaimana komposisi dari dana perkreditan, komposisi alat-alat likuid dan kewajiban-kewajibannya, agar di dalam manajemen dana bank khususnya di dalam mempertahankan tingkat likuiditas secara optimal dapat dicapai secara efektif dan seefisien mungkin.

Komposisi perbandingan adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk membandingkan komponen-komponen yang ada setiap susunan komposisi yang dianalisa. Pada sektor kredit jangka pendek dan pada tabel ini (tabel IV) nampak pula bahwa sebagaimana besar suplay dana pinjaman berasal dari suplay dana pinjaman jangka pendek yang mana baik secara kuantitas maupun secara prosentase memperlihatkan suatu peningkatan yang berfluktuasi, yaitu pada tahun 1986 jumlah suplay dana jangka pendek sebesar Rp. 7.600 juta atau 56,84 % dari total suplay dana pada tahun itu. Sedangkan suplay dana jangka panjang sebesar Rp. 5.769 juta atau 43,16 % dari total suplay dana pada saat itu. Pada tahun 1999 jumlah suplay dana jangka panjang sebesar, Rp. 7.753 juta atau 44,44 % dari jumlah suplay dana saat itu dan pada tahun 2000 suplay dana jangka pendek sebesar 56,37 % atau 15,505 juta dari total suplay dana dan untuk suplay dana jangka panjang sebesar Rp. 7.854 atau 43,63 % dari total suplay dana yang diperoleh pada tahun itu. Sedangkan pada tahun 2000 jumlah suplay dana yang



Rp 1. 743 juta berasal dari giro dinas jawatan atau 5,15 % dan Rp 6.395 juta berasal dari giro masyarakat.

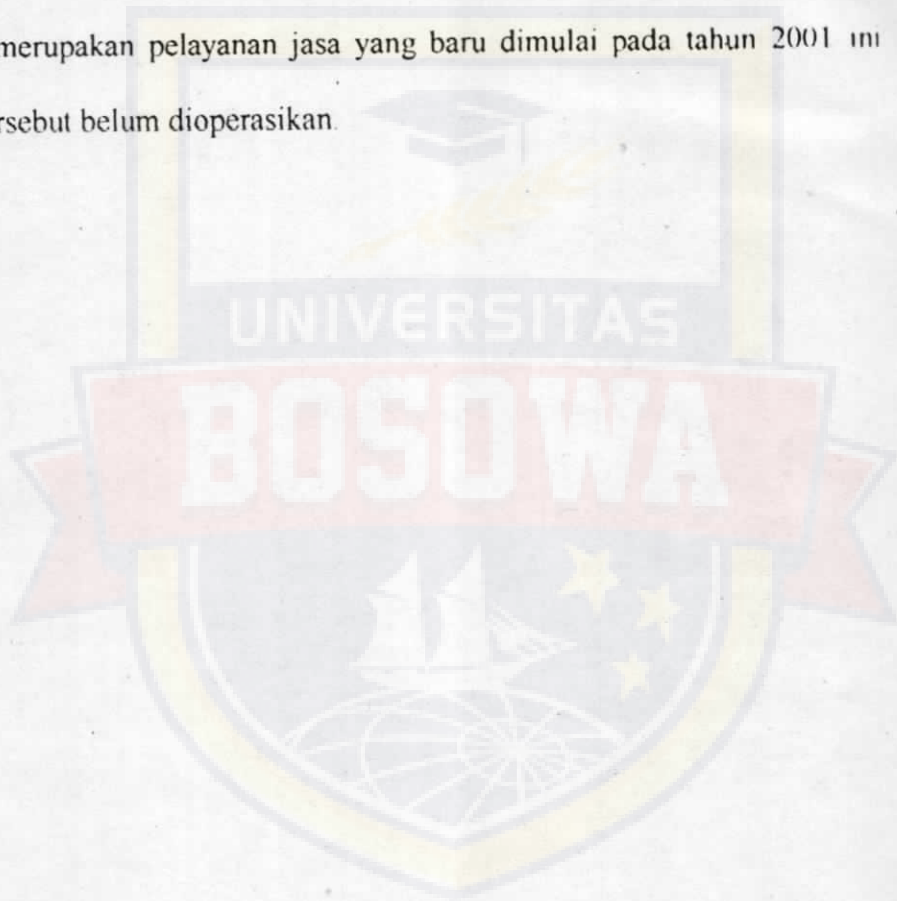
Pada tahun 2000 posisi dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat yaitu sebesar Rp 13.788 juta yang mana Rp. 6.836 Juta berasal dari giro pemerintah, Rp 2.283 juta berasal dari giro dinas jawatan dan Rp. 1.603 berasal dari giro pemerintah, 21,37 berasal dari dana dinas jawatan dan Rp. 1.603 berasal dari giro masyarakat. Sedangkan deposito untuk tahun 1999 berjumlah sebesar Rp. 3.053 juta atau 22,1 % berasal dari masyarakat. Sedangkan deposito 1999 berjumlah sebesar Rp 3. 053 juta atau 22, 1 % dari total dana yang berhasil di himpun. Pada tahun 2000 posisi dana yang berhasil dihimpun sebesar Rp 22, 077 juta yang mana dari jumlah tersebut Rp 14. 360 juta berasal dari giro pemerintah dan Rp 1. 520 berasal dari giro dinas jawatan serta dana giro dari masyarakat sebesar Rp 2, 393 juta serta untuk deposito sebesar Rp 3. 804 juta, sehingga kalau dilihat dari segi prosentasenya maka nampak sekali bahwa sebahagian besar dana tersebut berasal dari dana pemerintah atau sebesar 78, 59 % kemudian disusul oleh giro masyarakat sebesar 8, 32 % dan untuk deposito sebesar 17, 2 %. Dan hal tersebut terulang lagi meningkat pada tahun 2001 dimana dana yang berhasil dihimpun sebesar Rp 33. 629 juta, dan dari jumlah tersebut maka Rp 20. 926 juta berasal dari giro pemerintah atau 62, 22 % dan Rp 1. 743 juta berasal dari giro dinas jawatan atau 5, 15 % dan Rp 6 395 juta berasal dari giro masyarakat atau 32,63 % % dari total giro yang berhasil dihimpun. Sedangkan untuk total deposito yang berhasil dihimpun yaitu sebesar Rp

4. 273 atau 12, 1 %, dan untuk tabungan sebesar Rp 292 juta atau 0,9 juta dari total dana yang berhasil dihimpun dari kegiatannya.

Dengan melihat perkembangan perhimpunan dana dari pihak ketiga tersebut maka dapat disimpulkan bahwa giro masih merupakan sumber dana yang terbesar dari total dana yang bersedia pada bank BRI untuk meningkatkan frekuensi perkreditannya sebab diketahui bahwa dana yang berasal dari giro merupakan dana yang mempunyai tingkat penarikan yang cukup tinggi sehingga ketersediaan dana pada bank harus berada pada posisi yang siap. Selain itu jika dilihat dari frekuensi perkreditan khususnya penyaluran kredit jangka panjang pada bank BRI juga mengalami kelambatan atau pertumbuhan yang semakin menurun sehingga sebahagian besar dana yang ada masih mengendap, selain itu pula penurunan operasi perkreditan ini karena adanya kebijaksanaan yang ditempuh oleh pihak bank BRI didalam mempertahankan posisi keuangan khususnya posisi likuiditas, namun pengawasan dan tingkat pemeliharaan yang dicapai melampaui tingkat likuiditas yang disyaratkan oleh Bank Indonesia bahkan diatas tingkat kesehatan yang sewajarnya.

Dengan melihat posisi giro yang ada, maka dari total giro yang berhasil dihimpun, hanya Rp 1. 219 juta yang beredar atau 14, 18 % saja dari dana tersebut yang berhasil di operasikan dan Rp 176, 8 juta dari total deposito atau 9,99 % dari dana tersebut yang berhasil dioperasikan pada tahun 2001. Sedangkan pada tahun 1999 terlihat pula bahwa dari total giro yang ada hanya Rp 4. 879 juta yang berhasil dioperasikan atau sebesar 45,44 % dan untuk deposito yang berhasil dioperasikan pada tahun 1999. Sedangkan pada tahun 2000 jumlah giro yang dioperasikan sebesar

Rp 4.730 juta atau 25,99 % dari total giro yang ada dan untuk dana deposito sebesar Rp 494 juta atau 13,00 % dari total deposito yang ada, serta untuk tahun 2001 jumlah dana giro yang berhasil dioperasikan sebesar Rp 18.294 juta atau 62,76 % dari total giro dan untuk deposito yang berhasil dioperasikan sebesar Rp 826 juta atau 17,5 % dari total deposito pada tahun tersebut, dan untuk dana tabungan yang memang masih merupakan pelayanan jasa yang baru dimulai pada tahun 2001 ini sehingga dana tersebut belum dioperasikan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

5.1 Kesimpulan

Mengingat bahwa Bank BRI adalah salah satu Bank pemerintah terbesar di Indonesia dan sudah Go Publik, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Tentunya dari sisi lain terlihat bahwa kontribusi yang dapat diperoleh Bank BRI semuanya dari hasil berbagai komponen misalnya tabungan, giro, deposito, dan kredit yang disalurkan.

Setelah diadakan analisis terhadap likuiditas terhadap Bank BRI dari tahun 1999 yang berjumlah 10.644 naik menjadi 11.750 pada tahun 2000, begitupun untuk tahun 2001 dan 2002 naik dengan tingkat prosentase 43,25 %.

Di samping itu Bank BRI dalam menghimpun dana dari masyarakat dapat dikatakan lancar hal ini dapat dilihat dari dana tabungan maupun giro misalnya giro nasabah atau pihak ketiga yang ada pada tahun 1999 berjumlah 153.687 naik menjadi 174.958 untuk tahun 2000, dan begitu pula untuk tahun 2001 dimana giro nasabah yang berjumlah 209.058 naik menjadi 243.440 pada tahun 2002, selain itu dari sisi perkreditan Bank BRI juga mengalami tingkat kenaikan yang cukup menggembirakan dimana komposisi kredit dari tahun 1999 yang berjumlah 84.802 naik di tahun 2000 menjadi 120.005 atau tingkat prosentase sebesar 68,47 % menjadi 70,75 %.

Tingkat likuiditasnya di atas rata-rata tingkat likuiditas yang sewajarnya yaitu 15 % sebelum vacto 27 tahun 1989 dan sesudahnya.

Jika hal ini diabaikan begitu saja maka bukan tidak mungkin akan memberikan efek yang kurang baik terhadap kestabilan dana-dana bank pada masa yang akan datang utamanya dalam meningkatkan pendapatnya.

Dari sisi lain analisis banking juga memperlihatkan peningkatan likuiditas yang tidak proposional dengan tingkat kebutuhan operasinya, dimana diperlihatkan bahwa kemampuan dari Bank BRI untuk memberikan kredit adalah sedemikian besarnya namun yang terjadi malah sebaliknya.

Juga disisi lain dapat dilihat dari analisis likuiditas dengan menggunakan cash ratio nampak bahwa untuk tahun 2000 sebesar 20,21 % naik menjadi 25,68 % hal ini dapat dikatakan likuiditas Bank BRI mengalami kenaikan yang cukup tinggi.

5.2. Saran-saran

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan serta hasil analisis likuiditas yang telah dilakukan, dengan ini ada beberapa hal yang menjadi sorotan penulis yang mungkin biasa dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak Bank BRI di dalam menata laksanakan sistim operasional dana bank khususnya di dalam menetapkan kebijaksanaan manajemen kredit serta penetapan tingkat likuiditas yang sesuai dengan tingkat kebutuhan antara lain :

- a. Dengan tidak proposionalnya dana yang tidak tersedia dengan tingkat kebutuhan yang seharusnya, maka kiranya perlu diadakan peninjauan.

kembali tentang manajemen kredit yang diterapkan selama ini guna mengambil kebijak sanaan –kebijaksanaan yang bisa lebih terarah

- b. Begitu pula halnya dengan penentuan wewenang bagi kantor-kantor cabang, madya maupun cabang pembantu kiranya bisa diberikan kesempatan di dalam menentukan kebijaksanaan dalam hal pemberian kredit selama hal itu tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan
- c. Mungkin lebih bijaksana pula jika kelebihan dari dana yang tidak produktif dapat diinvestasikan pada sektor lain misalnya membeli surat-surat berharga di luar SBI Bank Indonesia sehingga dapat memberikan angin segar pada kegairahan dunia perbankan.
- d. Dengan Go Publiknya Bank BRI diharapkan tingkat pelayanannya dapat lebih bagus tanpa ada diskriminasi dan dapat melayani masyarakat dari berbagai lapisan.



Daftar Pustaka

- Anwar, Achmad. *Praktek Perbankan Indonesia*, Penerbit Balai Aksara, Jakarta
- Arif, Saleh, *Profil Usaha Kecil dan Kebijakan Kredit Perbankan di Indonesia*
Penerbit Lembaga Manajemen FE-UI, Jakarta, 1995
- Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Penbelanjaan Perusahaan*, Yogyakarta, Penerbit Gajah Mada, 1995
- Fratcher, Lc. Harles, *money and Banking Eight Edition Newyork*: Richard, D Lewin Inc, Home Wood, Illionis, 1992
- G, Lucket, Dudley, *Uang dan Perbankan*, Penerbit Erlangga, Jakarta 1991
- Hadiwidjaya, dan R.A Rivai. *Wirasasmita, Manajemen Dana Bank*, Penerbit Pionir Jaya, Bandung, 1996
- Mulyono, Teguh Pudjo, *Analisis Laporan Keuangan untuk Perbankan*. Penerbit Jambatan, Jakarta, 1995
- Paul, A. Samuelson, dan William, D Hordhaus. *Ekonomi Edisi Kedua belas Jilid 1*
Penerbit Jaka Wasana
- Suyatno, Thomas, *Dasar-Dasar Perkreditan*. Penerbit Pustaka Utama, Jakarta 1992
- Undang-Undang Pokok Perbankan, *Tentang Pokok-Pokok Perbankan, Nomor 14 Tahun 1967*. Penerbit Sinar Terang, Surabaya, 1992.
- Van Horne, James C. *Fundamental Of Financial Managemen, Second Edition*, Englewood, New Jersey, Prentice Hall, Inc, 1992
- Winardi, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Penerbit Tarsito, Bandung 1993